

LAPORAN PENELITIAN



MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Ketua
Adhianty Nurjanah, S.Sos M.Si NIK : 163 125
Anggota
Dian Anggraini 201153104

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Juli 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di Indonesia sudah dilakukan. Komitmen pemerintah ditandai dengan pada tahun 2000 mengeluarkan Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di segala bidang pembangunan guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi atas kebijakan pemerintah yang responsif gender. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu kebutuhan dan komitmen pembangunan untuk menciptakan kualitas peran perempuan dalam mencapai Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG). Hal ini juga sesuai dengan target pelaksanaan Deklarasi *Millenium Development Goals (MDGs)* di tahun 2015 terutama yang berhubungan langsung dengan isu gender, yakni pada point (3) mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, point (4) menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dasar, dan pada point (5) meningkatkan kesehatan ibu, dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi setengahnya selama tahun 1990-2015. Berdasarkan laporan yang ada tentang capaian *MDGs* Indonesia pada tahun 2010, berdasarkan target tahun 2014 diketahui bahwa Indonesia baru mencapai angka kematian balita 44/1.000 kelahiran hidup dari targetnya 32/1.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi 34/1.000 kelahiran hidup dari target 23/1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu 228/100.000 kelahiran hidup dari target 102/100.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian, dalam hal memerangi HIV/AIDS di Indonesia mencapai keberhasilan terutama dalam hal peningkatan jumlah pemakai kondom pada hubungan seks, dari rata-rata 12,8% untuk laki-laki dan perempuan saat ini prosentase perempuan sebesar 10,3% dan laki-laki mencapai 18,4%.

Upaya pemerintah Indonesia untuk memberdayakan perempuan melalui kebijakan berspektif gender sebenarnya sudah dilakukan. Namun pada kenyataannya ternyata ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan gender dalam

berbagai akses dan kesempatan berpartisipasi terhadap pembangunan serta memanfaatkan pembangunan masih sering terjadi, dengan perempuan sebagai penerima ketidakberuntungan (Hubeis, 2010).

Dalam memberdayakan perempuan dalam pembangunan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan pihak swasta / perusahaan saat ini ikut berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* saat ini bukan merupakan wacana baru lagi. Berbagai pihak sudah memahami pentingnya program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, tetapi lebih dari itu mereka juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan orang dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini. Perusahaan dituntut untuk memahami kebutuhan lingkungan sebagai sumber daya yang harus dijaga kelestarian dan keberlanjutannya sehingga bisa terus dinikmati oleh generasi masa sekarang dan tetap dinikmati oleh generasi berikutnya.

Idealnya program *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat secara sosio ekonomis. Secara umum tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat secara sosio ekonomis termasuk perempuan miskin. Dengan demikian dampak penting dari program CSR adalah masyarakat penerima manfaat (*beneficeries*) dapat lebih mandiri, mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan sanggup berperan serta dalam proses pengembangan dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian, implementasi program CSR oleh perusahaan selama ini cenderung masih bersifat *charity*, filantropi dan terkadang tidak terprogram. Selain itu dalam hal partisipasi dan dukungan berbagai *stakeholder*, baik dari pemerintah dan masyarakat *beneficeries* program CSR yang dilakukan perusahaan cenderung masih kurang mendapat dukungan dan partisipasi positif dari berbagai *stakeholder*. Hal ini dapat diketahui pada tahapan perencanaan program, pelaksanaan, pembiayaan program, monitoring dan evaluasi program CSR.

Bagi perusahaan BUMN (badan usaha milik negara), Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR). Namun demikian, masih banyak Program CSR perusahaan yang belum mampu memberdayakan dan melibatkan partisipasi masyarakat penerima manfaatnya (*beneficiaries*). Dengan demikian diperlukan model pemberdayaan yang dapat diadaptasikan sehingga seluruh program CSR dapat melibatkan peran serta partisipasi seluruh masyarakat penerima manfaatnya (*beneficiaries*) dan dapat memberdayakan masyarakat penerima manfaatnya (*beneficiaries*) baik secara sosio ekonomi.

Salah satu perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adalah PT Sari Husada Yogyakarta melalui Program Rumah Srikandi. Program Rumah Srikandi adalah program CSR yang bertujuan memberdayakan perempuan miskin perkotaan yang tinggal di sepanjang sungai Winongo melalui 3 pilar utamanya yaitu program peningkatan kesehatan (*Nutrition Development Program*), program peningkatan pendidikan anak (*Child Education Development Program*) dan program peningkatan ekonomi (*Economic Development Program*). Dipilihnya wilayah program dan masyarakat penerima manfaat di daerah Badran ini dikarenakan wilayah ini merupakan daerah miskin perkotaan yang letaknya berada di sepanjang sungai Winongo dan merupakan *black area* di kota Yogyakarta baik secara ekonomi, pendidikan dan sosial memang sangat perlu diberdayakan.

PT Sari Husada telah melakukan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan yang terbagi dalam 4 bidang yaitu; kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Khusus pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi perempuan PT Sari Husada melakukan melalui program CSR Rumah Srikandi yang dimulai pada tahun 2009-2014. Adapun wilayah program CSR Rumah Srikandi di RW XI Kampung Badran Jetis Yogyakarta yang merupakan *black area* Kota Yogyakarta. Pelaksanaan program CSR Rumah Srikandi di lapangan oleh PT Sari Husada

dilakukan bekerjasama dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan bermitra dengan NGO Nasional yaitu PKPU Yogyakarta. (Sari Husada, 2013).

Khusus pada Program CSR Rumah Srikandi PT Sari Husada pada tahun 2012 yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan *CSR Best Practice for MDGs* dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemkenko Kesra) pada bulan September 2012. Hal ini dikarenakan, Program CSR Rumah Srikandi dinilai mampu turut serta dalam membangun masyarakat miskin perkotaan (urban) khususnya para perempuan di Kampung Badran Yogyakarta.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini melakukan analisis terhadap implementasi program CSR Rumah Srikandi PT Sari Husada dan pemberdayaan perempuan sebagai kelompok penerima manfaat Program CSR Rumah Srikandi PT Sari Husada Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh PT Sari Husada Yogyakarta melalui Program CSR Rumah Srikandi?
2. Bagaimana model pemberdayaan perempuan yang seharusnya dilakukan oleh PT Sari Husada Yogyakarta melalui Program CSR Rumah Srikandi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh PT Sari Husada Yogyakarta melalui Program CSR Rumah Srikandi dan mengetahui model pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh PT Sari Husada Yogyakarta melalui Program CSR Rumah Srikandi.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi keilmuan pada kajian Ilmu Komunikasi khususnya mengenai implementasi program *Corporate Soacial Responsibility (CSR)*.
2. Dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perusahaan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas program *Corporate Soacial Responsibility (CSR)* yang berspektif perempuan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan

a. Konsep Pembangunan

Menurut Todaro (1977) pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*) dan pemberantasan kemiskinan absolut. Todaro (1977) juga menambahkan bahwa pembangunan merupakan konsep normatif yang menyiratkan pilihan yang bertujuan untuk mencapai realisasi potensi manusia atau peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya yang mencakup pengertian “menjadi” atau *being* dan “mengerjakan” atau *doing*, sedangkan pembangunan juga merupakan salah satu diantara konsep-konsep paling mendesak di zaman sekarang ini yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab tentang nilai, teknik dan pilihan-pilihan.

Dalam menjelaskan definisi pembangunan terdapat tiga kelompok teori pembangunan yaitu: 1) Teori modernisasi yang menekankan pada faktor manusia dan nilai-nilai budaya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan, 2) Teori ketergantungan (*dependency theory*) sebagai reaksi terhadap teori modernisasi yang dianggap kurang memadai, bahkan menyesatkan, dan 3) Teori yang belum memiliki nama sebagai reaksi terhadap teori ketergantungan yang disebut sebagai teori atau ide pembangunan yang lain (Suryono, 2001).

Dalam perkembangannya, teori pembangunan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam merespon perubahan sosial yang terjadi terutama di negara berkembang sehingga memunculkan teori baru yang disebut teori *People Centered Development* yang menurut Korten (dalam Mardikanto, 2010) bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan pada kualitas hidup manusia bukan pada pertumbuhan ekonomi melalui pasar maupun memperkuat negara.

Dalam mewujudkan tujuan *People Centered Development*, menurut UI Haq (dalam Mardikanto, 2010) terdapat empat komponen penting dalam proses pembangunan manusia diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan dalam memperoleh kesempatan (*Equal Access to Opportunity*)
Bahwa kesetaraan akses adalah kesempatan dan tidak harus kesetaraan hasilnya. Selama akses kesempatannya sama sekalipun hasilnya bisa berbeda maka pembangunan manusia ini dianggap sudah berhasil,
2. Keberlanjutan (*Sustainability*)
Bahwa generasi yang akan datang harus bisa menikmati kesempatan yang sama dengan generasi sekarang.
3. Produktivitas (*Productivity*)
Bahwa dibutuhkan investasi pada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Target dari peningkatan produktifitas adalah peningkatan kualitas manusia, sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya menjadi salah satu bagian dari produktivitas.
4. Pemberdayaan (*Empowerment*)
Bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk kepentingan sendiri sehingga mereka harus bisa mempengaruhi keputusan yang terkait dengan hidup mereka.

Dengan demikian konsep pembangunan dalam teori *People Centered Development*, pembangunan manusia adalah menjadi hal yang utama.

b. Pembangunan Manusia Berbasis Pada Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas (*Community Based Resources Management*).

Dalam mewujudkan empat komponen pembangunan manusia terdapat strategi pembangunan yang dapat dikembangkan, menurut Soetomo (2006) yaitu melalui Pengelolaan Sumber Daya berbasis komunitas (*Community Based Resources Management*). Strategi Pengelolaan Sumber Daya berbasis komunitas (*Community Based Resources Management*) adalah strategi pembagunan masyarakat yang memberikan peran dominan pada masyarakat pada tingkat komunitas untuk mengelola proses pembangunan, khususnya dalam mengotrol dan mengelola sumber daya produktif komunitas. Dalam hal ini peran, partisipasi serta kreatifitas masyarakat komunitas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan.

c. Pembangunan Manusia Melalui Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dalam pembangunan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, mengontrol dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

a) Akses

Yang dimaksud dengan aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.

Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat.

b) Partisipasi

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.

c) Kontrol

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.

d) Manfaat

Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki.

Sejak Pelita VI Program Perencanaan Pembangunan (Propenas), Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi kebijakan nasional yang pendekatannya menfokuskan pada peran dan keterlibatan perempuan di berbagai sektor pembangunan. Adapun isu-isu gender yang diutamakan dalam Propenas adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kesempatan kerja untuk perempuan
- b. Rendahnya akses perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi
- c. Suatu asumsi bahwa kerja perempuan sebagai pekerjaan tambahan atau tenaga kerja keluarga
- d. Rendahnya partisipasi tenaga kerja perempuan
- e. Tingginya partisipasi perempuan dalam pekerjaan marginal
- f. Diskriminasi terhadap perempuan pekerja dalam proses seleksi dan promosi
- g. Rendahnya proteksi terhadap perempuan pekerja

Adapun strategi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mewujudkan tujuan dan pendekatan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan gender ke semua proses dan tahap pembangunan
2. Melaksanakan kegiatan spesifik yang ditujukan pada perempuan
3. Memperbaiki kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dengan visi pemberdayaan perempuan termasuk pada organisasi perempuan.

Untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan menggunakan pendekatan pembangunan yang secara langsung maupun secara tidak langsung terkait dalam peningkatan peran perempuan antara lain:

a) Pendekatan Kesejahteraan

Pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pada konteks peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarganya.

b) Pendekatan Penyamaan Hak

Pendekatan pembangunan yang diarahkan pada upaya pencapaian kesamaan pengembangan peran perempuan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan seperti halnya laki-laki dengan memperhatikan tiga peran perempuan yaitu peran reproduksi, produktif dan peran sosial

c) Pendekatan Penguatan (Empowerment)

Pendekatan pembangunan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan yang diarahkan pada pemampudayaan perempuan melalui kemandirian (Hubeis, 2010)

2. Pemberdayaan

a. Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini menggunakan teori *Community Development* (CD) atau pengembangan masyarakat/ pemberdayaan masyarakat sebagai teori dasar yang merupakan landasan berpikir penelitian. Menurut *World Bank* (2001) pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat miskin untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide dan gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu konsep, metode, produk, tindakanyang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga memberdayakan tersebutadalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Mardikanto, 2010c).

Pemberdayaan masyarakat menurut Tim Deliveri (2004) dalam (Mardikanto,2014) sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Proses pemberdayaan masyarakat ini menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*). Menurut Moh Ali Aziz dkk (2005), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya

pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Sedangkan menurut Sumodiningrat (1999) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan perusahaan sebagai pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Adapun prinsip-prinsip pengembangan masyarakat menurut Ife terdapat 22 prinsip adalah :

- 1). Pembangunan terpadu (*intergrated development*)
- 2). Melawan ketidakberdayaan struktural (*confronting struktural disadvantages*)
- 3). Hak asasi manusia (*human rights*)
- 4). Keberlanjutan (*sustainability*)
- 5). Pemberdayaan (*empowerment*)
- 6). Kaitan masalah pribadi dan politik (*the personal and the political*)
- 7). Kepemilikan oleh komunitas (*community ownership*)
- 8). Kemandirian (*self reliance*)
- 9). Ketidaktergantungan pada pemerintah (*independent from the state*)
- 10). Keterkaitan tujuan pendek dengan visi jangka panjang (*immediate goals and ultimate vision*)
- 11). Pembangunan bersifat organik (*organic development*)
- 12). Kecepatan pembangunan (*the pace of development*)
- 13). Keahlian dari luar (*external expertise*)
- 14). Pembangunan komunitas (*community buiding*)
- 15). Kaitan proses dengan hasil (*process and outcome*)
- 16). Integritas proses (*the integrity of process*)
- 17). Tanpa kekerasan (*non violance*)
- 18). Keinklusifan (*inclusiveness*)
- 19). Konsensus (*concensus*)
- 20). Kerjasama (*cooperation*)
- 21). Partisipasi (*participation*)

22). Perumusan kebutuhan (*defining need*)

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan

Secara umum tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah memberdayakan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat secara sosio ekonomis. Dengan demikian, mereka dapat lebih mandiri, mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, dan sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Tujuan yang lebih spesifik lagi dari pemberdayaan masyarakat (Mardikato, 2013) adalah sebagai berikut:

a) Perbaiki kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan / tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b) Perbaiki usaha (*better business*)

Dengan adanya perbaikan aksesibilitas dan perbaikan kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan

c) Perbaiki pendapatan (*better income*)

Dengan adanya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

d) Perbaiki Lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan

e) Perbaiki kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat

f) Perbaiki masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Melalui pemberdayaan masyarakat, warga masyarakat diharapkan dapat menjadi lebih berdaya, berkekuatan dan berkemampuan. Menurut Sumardjo (1999) dalam Hadi (2014) ciri-ciri masyarakat yang berdaya adalah sebagai berikut:

- 1). Mampu memahami diri dan potensinya
- 2). Mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
- 3). Mampu mengarahkan dirinya sendiri
- 4). Memiliki kekuatan untuk berunding
- 5). Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama saling menguntungkan
- 6). Bertanggungjawab atas tindakannya

Dengan demikian melalui program pemberdayaan masyarakat, masyarakat yang dulunya belum berdaya secara ekonomi, sosial dan ekologi menjadi masyarakat yang lebih berdaya, berkekuatan dan berkemampuan sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan.

c.Pemberdayaan Perempuan

Salah satu pendekatan dalam pembangunan yang telah melihat semua kerja perempuan baik kerja produktif, reproduktif, privat maupun publik adalah pemberdayaan perempuan atau dikenal juga dengan pendekatan GAD (*Gender and Development*). Pendekatan ini mengarah pada pendekatan struktural yang menekankan konstruksi sosial gender. Pelaksanaannya menurut Handayani dan Sugiarti (2005) memerlukan dukungan sosio-budaya masyarakat dalam politik nasional untuk menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki.

Pemberdayaan perempuan menurut Suman (2007) adalah upaya memungkinkan, memandirikan masyarakat, dan menghilangkan diskriminasi. Hal ini dapat dicapai melalui dorongan, motivasi, dan kesadaran potensi yang dimiliki. Pemberdayaan perempuan sebagai kebijakan pemerintah telah tertuang dalam GBHN 2009 yang bertujuan untuk memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara aktif tanpa menghapus peran reproduktif perempuan. Kebijakan pemerintah yang diarahkan pada pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk:

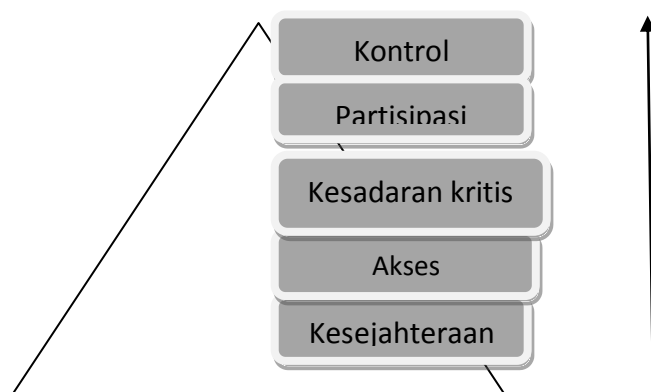
1. memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa melalui kebijakan nasional yang dilakukan oleh suatu institusi yang mampu untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan
2. memperbaiki kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan seraya mempertahankan kesatuan nilai-nilai sejarah perjuangan perempuan dalam rangka untuk melanjutkan upaya pemberdayaan perempuan, keluarga dan kesejahteraan sosial.

Menurut Hubeis (2014) terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi perilaku perempuan dalam merespons pelaksanaan program pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

1. Konsep Diri Perempuan (*Self Concept*)
adalah bagaimana seseorang perempuan dan laki-laki berpikir dan merasakan dirinya sebagai “Apa” dan “Siapa”
2. Gender dan Peran Perempuan
adalah konstruksi sosial yang mengacu pada perbedaan sifat perempuan dan laki-laki yang tidak didasarkan pada perbedaan biologis tetapi pada nilai-nilai sosial budaya yang menentukan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan perseorangan (pribadi) dan dalam tiap bidang masyarakat yang menghasilkan peran gender
3. Pembagian Kerja
adalah analisis pembagian kerja pada kelompok sasaran pada suatu area proyek akan memberikan gambaran tentang penggunaan waktu dari perempuan dan laki-laki dalam melakukan pekerjaan yang berbeda

Sara Longwe dalam Handayani dan Sugiarti (2005) melihat pemberdayaan perempuan melalui lima hal, yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut merupakan hubungan yang sinergis, saling melengkapi, dan memiliki hubungan yang hierarkis.

Pada pendekatan ini tingkat kesetaraan berbanding lurus dengan tingkat keberdayaan.



Sumber: Handayani dan Sugiarti (2005)

Gambar 1. Piramida Pemberdayaan Perempuan

Dimensi kesejahteraan dalam pendekatan Longwe diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan. Kesenjangan gender pada tingkat ini diukur perbedaan kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam tingkat penghasilan, kematian, atau gizi. Pemberdayaan tidak dapat terjadi di tingkat ini, melainkan harus dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap sumberdaya. Upaya untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan diperlukan keterlibatan perempuan dalam proses pemberdayaan dan pada tingkat pemerataan yang lebih tinggi.

Selain itu, dimensi akses melihat perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan. Rendahnya akses terhadap sumberdaya mengakibatkan produktivitas yang juga rendah. Perempuan di banyak komunitas diberikan tanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk meningkatkan kemampuan diri. Pembangunan tidak cukup hanya pemerataan akses, karena kurangnya akses disebabkan dari diskriminasi gender. Oleh karena itu untuk mengatasi kesenjangan gender akibat diskriminasi sistemik harus diatasi melalui penyadaran. Selanjutnya, kesadaran kritis adalah upaya untuk “melawan” subordinasi perempuan. Kesenjangan gender di tingkat ini disebabkan anggapan posisi sosial ekonomi

perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pemberdayaan di tingkat ini untuk berarti melakukan penolakan pada pandangan tersebut. Tujuannya adalah penyadaran kesetaraan gender.

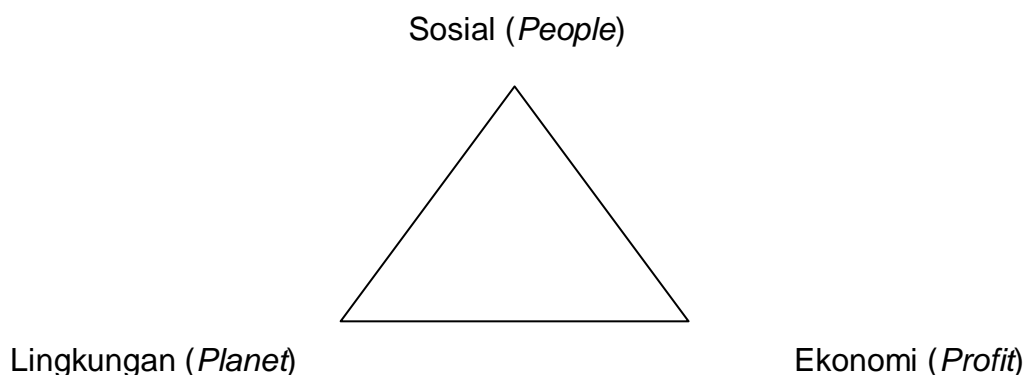
Dimensi partisipasi yaitu keterlibatan perempuan secara aktif mulai dari penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring, sampai evaluasi. Meningkatnya peran serta perempuan merupakan hasil pemberdayaan. Partisipasi dibedakan menjadi partisipasi kuantitatif (jumlah laki-laki dan perempuan yang terlibat) dan kualitatif (peranan laki-laki dan perempuan dalam mengambil keputusan). Terakhir adalah dimensi kontrol, artinya perempuan harus punya kuasa untuk mengubah kondisi posisi, masa depan diri dan komunitasnya. Kesetaraan dalam kuasa menjadi prasyarat bagi terwujudnya kesetaraan gender dan keberdayaan dalam masyarakat yang sejahtera.

3. *Corporate Sosial Responsibility*(CSR)

a. Pengertian CSR

Konsep CSR menurut CSR Asia terdiri atas “Triple bottom line” yang dituangkan oleh Jhon Elkington, yang menyatakan bahwa jika perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3 P” (Profit, People dan Planet). Perusahaan dalam mengejar keuntungan (*Profit*) harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*People*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*).

Hubungan antara *Profit*, *People* dan *Planet*



Bagan 1 : *Triple P*

Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, tetapi lebih dari itu mereka juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan orang (*people*) dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini (*planet*). “Profit” diartikan sebagai wujud aspek ekonomi, “planet” sebagai wujud aspek lingkungan dan “people” sebagai aspek sosial atau masyarakat. Pendapat John Elkington terhadap konsep CSR memberikan perhatian yang lebih luas bagi perusahaan dalam melakukan praktik bisnisnya. Perusahaan dituntut untuk memahami kebutuhan lingkungan sebagai sumber daya yang harus dijaga kelestarian dan keberlanjutannya sehingga bisa terus dinikmati oleh generasi masa sekarang dan tetap dinikmati oleh generasi berikutnya. Atau dengan kata lain sebagai wujud timbal balik antara perusahaan dan lingkungan masyarakat yang telah mendapat keuntungan dari sumber daya alam tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai lembaga internasional yang beranggotakan 120 perusahaan multinasional dari 30 negara dunia. WBCSD mendefinisikan tentang CSR sebagai berikut:

“CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of live of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”. (dalam Prayogo, 2011).

Definisi tersebut mengungkapkan bahwa CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan berikut komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Sedangkan World Bank mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan guna memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis, agenda pembangunan yang berkelanjutan maupun masyarakat umum. Menurut Lingkar Studi CSR Indonesia, CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku

kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan. Adapun Widjaya & Pratama (2008) dalam (Hadi, 2014) ada tiga hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai CSR, ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. CSR sebagai suatu artificial person, perusahaan tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi. Perusahaan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggungjawab terhadap ekonomi, lingkungan dan sosialnya.
2. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan sangatlah ditentukan oleh seluruh stakeholdernya. Para stakeholder ini terdiri atas shareholder, konsumen, pemasok, klien, customer, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.
3. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan atau dikelolanya.

Dengan demikian, CSR adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (bisnis) sehingga menjalankan CSR berarti juga menjalankan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

b. CSR dan Perusahaan

Perusahaan saat dalam megoperasionalkan perusahaan tidak hanya bertujuan mencari keuntungan saja. Melainkan perusahaan ini harus juga dapat mengelola upaya-upaya sosial yang dapat mendukung perusahaan ketika beroperasi.

Menurut Hart(2010) bahwa perusahaan multi nasional saat ini dituntut untuk memikul tanggung jawab lebih luas daripada sebelumnya, termasuk operasi dan kebijakan perusahaan dalam mengembangkan produk yang aman, memberikan kualitas tinggi dan layanan yang handal, bisnis dilakukan dengan praktik-praktik yang etis, hak atas kesejahteraan, kondisi kerja yang nyaman, perdagangan yang adil, pemasaran dan komunikasi yang bertanggung jawab, keterlibatan *stakeholder*, keterbukaan informasi dan *code of conduct*.

Hart (2010) juga menambahkan bahwa CSR pada perkembangannya dapat menjadi alat perusahaan yang digunakan secara taktis untuk meredam kritik dan melindungi citra perusahaan atau juga dapat dijadikan alat yang efektif dalam masyarakat yang demokratis untuk membuat perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dengan menciptakan etos bisnis yang berkelanjutan. Dengan kata lain, CSR saat ini telah menjadi cermin pembangunan sosial dalam masyarakat yang demokratis, sehingga CSR sering digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan yang seimbang seperti merasionalkan pertumbuhan pembangunan sehingga dapat menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Berkaitan dengan praktik CSR, Heimann (2008) menyebutkan beberapa keuntungan dan alasan mengapa CSR perlu dilaksanakan suatu perusahaan, yaitu:

- 1) hal etis yang harus dilakukan perusahaan,
- 2) meningkatkan citra perusahaan,
- 3) menghindari peraturan yang berlebihan,
- 4) jenis kegiatan tanggung jawab sosial yang dapat juga menguntungkan,
- 5) lingkungan sosial yang lebih baik akan bermanfaat bagi perusahaan,
- 6) menarik minat para investor,
- 7) meningkatkan motivasi karyawan, dan
- 8) membantu untuk memperbaiki masalah sosial yang disebabkan oleh bisnis.

Dengan demikian dampak implementasi CSR dengan perusahaan adalah akan menguntungkan perusahaan jika dilakukan dalam beberapa cara, yaitu: 1) membantu daya tarik dan retensi staf, 2) menarik investasi yang hijau dan etis, 3) menarik pelanggan yang sadar dan etis, 4) dapat mengakibatkan pengurangan biaya melalui konsep daur ulang, 5) dapat membedakan dengan pesaing dan menjadi keunggulan kompetitif, dan 6) dapat menyebabkan peningkatan profitabilitas dalam jangka panjang Heimann (2008).

F. Metode Penelitian

1. Format Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Whitney (dalam Nazir, 1988: 63) yaitu penelitian untuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, metode studi kasus adalah memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. (Nazir, 1988:66).

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Sari Husada Yogyakarta dengan pengkhususan pada Program CSR Rumah Srikandi Kampung Badran, Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta. Waktu penelitian : Maret-Juni 2015

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Masyarakat khususnya perempuan sebagai masyarakat penerima Program CSR Rumah Srikandi di Kampung Badran, Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta

4. Teknik Pengambilan Informan

Menurut Koentjaraningrat (1993: 130) informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk keperluan informasi yaitu orang-orang yang dapat memberikan

informasi atau keterangan data yang diperlukan oleh peneliti, informan ini dipilih dari orang-orang yang betul-betul dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu:

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara atau *interview guide* (Nazir, 1988: 234).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data dengan memanfaatkan semua dokumen-dokumen penting yang menyangkut perusahaan secara umum, misalnya *company profile*, web site perusahaan, media internal dan lain-lain.

c. Studi pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber data dan acuan teori yang berhubungan dengan penelitian yang diambil yaitu mengenai implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

6. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis, atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2001: 103). Selain itu data dianalisis dengan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi data

Yaitu proses pemilahan, penyederhanaan dari informasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara

- membuat ringkasan, mengkode data dan membuat gugus-gugus. Untuk itu, peneliti melaksanakan pemilahan data yang diperoleh dari wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan dan bermakna yang berkaitan dengan penelitian. Proses ini akan terus berlangsung hingga laporan lengkap tersusun.
- c. Penyajian data
Yaitu usaha menggambarkan fenomena/keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi dan disajikan kedalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.
 - d. Menganalisa data
Analisa data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan permasalahan, sebelum ke lapangan dan berlangsung hingga hasil penelitian.
 - e. Kesimpulan
Yaitu permasalahan penelitian yang menjadi pokok pemikiran terhadap apa yang diteliti. Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan terhadap data yang telah direduksi kedalam laporan secara sistematis, dengan cara membandingkan, menghubungkan dan memilah data yang mengarah pada pemecahan masalah, mampu menjawab permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai.

7. Uji Validitas Data

Teknik yang dilakukan dalam uji validitas data yaitu dengan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2001: 178), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Menurut Patton (dalam Moleong, 2001 : 178) menyebutkan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal yang dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PROGRAM CSR RUMAH SRIKANDI PT SARI HUSADA YOGYAKARTA

A. Profil Program CSR Rumah Srikandi

Program CSR Rumah Srikandi adalah program yang berbasis komunitas bertujuan untuk mendorong kemandirian dan kreativitas masyarakat dalam meningkatkan mutu kesehatan anak dan balita.

Adapun wilayah program CSR Rumah Srikandi adalah di RW XI Kampung Badran Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampung Badran terletak 2,45 km di sebelah barat laut Kraton Yogyakarta dan termasuk dalam Kelurahan Bumijo. Adapun batas-batas wilayahnya di sebelah utara dibatasi oleh Kampung Pingit, di sebelah timur dibatasi oleh Jalan Tentara Rakyat Mataram, di sebelah barat dibatasi oleh Sungai Winongo dan di sebelah selatan dibatasi oleh rel kereta api yang memisahkannya dari kelurahan Pringgokusuman. Adapun luas keseluruhan wilayah RW XI Badran mencakup ± 12,34 Ha dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 324 KK yang terdiri dari 1074 jiwa. Dalam program Rumah Srikandi ini yang menjadi sasaran program / masyarakat penerima manfaat adalah masyarakat miskin perkotaan RW XI Kampung Badran yang sebagian besar tinggal di wilayah bantaran sungai Winongo. Masyarakat kampung Badran sebagian besar bermata pencaharian di bidang wiraswasta, PNS rendahan dan swasta dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Dipilihnya wilayah program dan masyarakat penerima manfaat di daerah Badran ini dikarenakan wilayah ini merupakan daerah urban (perkotaan) yang letaknya berada di sepanjang kali winongo dan merupakan "*black area*, kampung hitam" nya kota Yogyakarta, karena perilaku masyarakatnya. Melalui Program CSR Rumah Srikandi ini, diharapkan akan merubah kebiasaan hidup masyarakat disana menjadi lebih baik Namun demikian wilayah Kampung Badran memiliki potensi yang sebenarnya dapat dibangun dan diberdayakan baik secara ekonomi dan sosial. Misalnya kegiatan ekonomi mikro di wilayah RW XI Badran bisa dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari banyaknya varian usaha yang tumbuh dan berkembang di kalangan warga RW XI.

Kampung Badran juga memiliki potensi ekonomi berupa *home industry* seperti penjual onde-onde ceplus, usaha penjual bakpia, yangko, susu kedelai, tahu dan lain-lain. Selain itu juga Kampung Badran memiliki kelompok budidaya ikan melalui sistem keramba, dan kelompok usaha simpan pinjam yang sebagian besar tergabung dalam koperasi. Akan tetapi potensi-potensi yang ada di Kampung Badran belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan belum berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya Program CSR Rumah Srikandi ini bekerjasama secara sinergis dengan NGO Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Yogyakarta.

Dalam hal ini program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PT Sari Husada Yogyakarta untuk masyarakat urban (miskin perkotaan) di wilayah Kampung Badran RW XI adalah melalui 3 pilar program utama yaitu :

1. *Nutrition Development Program*

Peningkatan kualitas gizi balita serta peningkatan keilmuan dan kesadaran tentang gizi balita bagi orangtua dan Kader Posyandu PKK RW XI Badran,

2. *Child Education Development Program*

Pengkapasitasan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

3. *Economic Development Program*

Pemberdayaan ekonomi mikro yang ada pada komunitas.

B.Sasaran sasaran / tujuan dari Program CSR Rumah Srikandi

Sasaran / tujuan dari Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Rumah Srikandi yaitu ikut serta dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badran dengan cara sebagai berikut:

- a. Hadirnya sebuah wadah pendidikan berkualitas baik yang dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi anak-anak usia dini di RW XI Badran Kelurahan Bumijo-Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta
- b. Meningkatnya kesadaran dari para orang tua akan pentingnya menjaga kesehatan dan gizi bagi para anak-anaknya melalui program kesehatan di RW XI Badran Kelurahan Bumijo-Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta yang berjalan secara kontinyu dan intensif

- c. Pengelolaan berbagai program kesehatan dan pendidikan oleh ibu-ibu PKK yang dapat berjalan intensif dan kontinyu serta sesuai standar operasional yang diharapkan.
- d. Dalam menuju kemandirian, pada tahap ini PKK mulai dibimbing ke arah penggalangan dana mandiri oleh Pengelola (misal 30 % dana operasional mampu diadakan secara mandiri) dengan cara :
 - Penumbuhan kontribusi dari warga dengan semacam SPP, subsidi silang, donasi rutin internal
 - Mulai ditumbuhkan semangat kemandirian misalnya penumbuhan dan pembinaan usaha ekonomi produktif
 - Usaha yang sudah mulai jalan seperti daur ulang sampah dalam bentuk produk dan pupuk organik, budidaya tanaman hias, dll dibina untuk dikelola secara profesional dalam wadah koperasi serba usaha.

C.Target Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Rumah Srikandi Yogyakarta

Target dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Program Rumah Srikandi PT. Sari Husada adalah sebagai berikut:

- a. Terbentuknya satu wadah pendidikan formal yang memberikan pendidikan anak usia dini yang berkualitas baik.
- b. Meningkatnya kesadaran gizi para orang tua di tingkat keluarga
- c. Berjalannya berbagai program kesehatan dan pendidikan secara optimal oleh PKK
- d. Terbentuknya kemandirian pengelolaan Rumah Srikandi oleh masyarakat RW XI Badran Kelurahan Bumijo-Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta
- e. Terbentuknya KSM atau koperasi yang betul-betul menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
- f. Peningkatan taraf perekonomian warga setempat.

D. Susunan Pengelola Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Rumah Srikandi Yogyakarta

Berikut susunan pengelola program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Rumah Srikandi PT. Sari Husada adalah :

- Branch Manager : Suropta
- Project Manager : Akhta Suendra, S. IP
- Admin and Finance Officer : Fadzilah Retna Wardhani, S. E
- Field Officer :
 1. Economic Development Program : Surahmadi, S.
 2. Child Education Development Program :
Setyaningsih, S. Psi
 3. Nutrition Development Program : Evi Damayanti, .

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemberdayaan Perempuan Dalam Program CSR Rumah Srikandi PT Sari Husada Yogyakarta

Upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan PT Sari Husada Yogyakarta melalui Program CSR Rumah Srikandi adalah melalui 3 pilar utama seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.
Pelaksanaan 3 Pilar Program CSR Rumah Srikandi

PROGRAM	TUJUAN/SASARAN	PELAKSANAAN
<i>Nutrition Development Program</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kesadaran Ibu akan pentingnya Gizi bagi ibu dan anak b. Mengoptimalkan Posyandu Plus 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan dan konsultasi gizi (pondok gizi) b. Pemberian makanan Tambahan (PMT) di posyandu c. Penyediaan layanan konsultasi kesehatan
<i>Child Education Development Program</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan sarana prasarana PAUD b. Pelatihan Pengelola PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas PAUD b. Capacity Building pengelola PAUD c. Studi banding pengelola PAUD
<i>Economic Development Program</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendirian Koperasi Amal Srikandi yang berbadan hukum b. Pemberian modal usaha produktif 	Memberikan bantuan pinjaman modal bagi usaha kecil masyarakat setempat melalui Koperasi Amal Srikandi

Sumber : Data lapangan yang Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas bahwa upaya yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan melalui 3 pilar kegiatan baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mikro.

Melalui program pemberdayaan masyarakat CSR Rumah Srikandi di bidang kesehatan (*Nutrition Development Program*) masyarakat Badran RW XI diberdayakan melalui berbagai program sadar gizi yang bertujuan untuk mendorong ibu-ibu balita mengenal pentingnya pengetahuan tentang gizi dan tumbuh kembang anak melalui berbagai penyuluhan gizi, parenting education, konsultasi gizi, pemeriksaan kesehatan gratis khusus ibu dan balita, dan program demo masak makanan sehat dan bergizi yang berguna bagi ibu dan balita. Melalui berbagai program kesehatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi Ibu dan balita / anak serta dapat mengurangi jumlah anak balita yang kekurangan gizi dan berstatus gizi buruk.

Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan anak (*Child Education Development Program*) dilakukan melalui program peningkatan kualitas pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan cara membuat sekolah PAUD dan melatih para kader dan pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Adapun kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para guru / kader PAUD, Studi Banding, Magang, dan mengadakan *Parenting Education* bagi para Kader dan pengelola PAUD. Seperti kita ketahui bersama, bahwa para kader dan pengelola PAUD yang terjun dalam program CSR Rumah Srikandi merupakan ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki *skill* mengajar dan keilmuan di bidang pengajaran. Dengan demikian melalui program CSR Rumah Srikandi ini diharapkan warga masyarakat khususnya para kader dan pengelola PAUD dapat menjadi kader-kader PAUD yang lebih baik dan terampil mengajar. Selain itu terwujudnya sekolah PAUD yang berkualitas dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi mikro (*Economic Development Program*). Program Rumah srikandi difokuskan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatan keluarga dan penguatan kapasitas di bidang koperasi atau lembaga keuangan mikro komunitas. Peningkatan pendapatan keluarga miskin ini dengan membantu mengembangkannya usaha produktif

masyarakat setempat seperti usaha kerajinan tangan, makanan, dan batik yang sudah berjalan di Kampung Badran melalui pemberian bantuan pinjaman modal usaha melalui koperasi setempat. Diharapkan dengan adanya penguatan koperasi dapat mengembangkan potensi ekonomi dan usaha lokal yang telah ditekuni oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, koperasi simpan-pinjam dapat berfungsi dan ikut *support* usaha lokal yang dimiliki warga setempat, sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat Kampung Badran Yogyakarta. Dalam hal ini Koperasi “Srikandi” yang sebelum ada Program CSR Rumah Srikandi belum berbadan Hukum, saat ini menjadi Koperasi Swadaya Masyarakat yang berbadan hukum.

Upaya-upaya yang dilakukan PT Sari Husada dalam memberdayakan perempuan Badran mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat khususnya tokoh perempuan di Kampung Badran Yogyakarta. Seperti dalam wawancara Ibu Siti Rojanah Ketua PKK RW XI Kampung Badran, Yogyakarta pada 12 Mei 2015 berikut ini:

“Dengan adanya Program CSR Rumah Srikandi, Perempuan Badran jadi lebih pintar, jadi bisa ngomong runtut dan lebih tahu tentang kesehatan dan gizi balita” Karena kita banyak diberi pelatihan dan pendampingan oleh PT Sari Husada.” Saat ini ada sekitar 50 orang kader perempuan yang aktif di program Paud, Posyandu Plus dan program ekonomi mikro.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Endang Rohjiani yang merupakan tokoh motivator perempuan di Kampung Badran Yogyakarta pada 15 Mei 2015 berikut ini:

“Program CSR Rumah Srikandi, betul-betul membantu perempuan Badran. Perempuan Badran yang dulunya kurang produktif bisa menjadi lebih produktif, bisa membantu keluarga, sekarang sudah banyak yang punya usaha kecil sendiri”.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua RW XI kampung Badran Yogyakarta Bapak Joko Sularno pada 18 Mei 2015

“Program CSR Rumah Srikandi berdampak positif bagi kemajuan Kampung Badran khususnya perempuan di Kampung Badran. Sekarang Kader Posyandu yang semuanya ibu-ibu bertambah banyak, pengetahuan dan pengalaman mereka juga meningkat karena ada pelatihan, pendampingan juga studi banding dari PT Sari Husada. Selain itu Kampung Badran jadi punya PAUD dan Koperasi yang sudah berbadan hukum”.

Menurut Bapak Joko Sularno Program CSR Rumah Srikandi ini juga bermanfaat bagi seluruh warga RW XI Kampung Badran Yogyakarta. Seperti yang disampaikan dalam wawancara berikut ini:

“Program CSR Rumah Srikandi ini sangat bermanfaat bagi warga RW XI Kampung Badran, karena membantu warga baik dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi warga. Misalnya di bidang kesehatan, Posyandu saat ini dapat dilakukan secara kontinyu dan telah terpenuhi seluruh meja sesuai standar. Di bidang pendidikan, Kami sekarang memiliki PAUD dengan fasilitas yang lengkap dan pengajar yang professional karena diberi pelatihan yang sesuai. Di bidang ekonomi, warga diberi pelatihan tentang manajemen usaha, keuangan, administrasi, motivasi usaha, dan penguatan jaringan pasar yang dapat mendukung kami pada saat membuka usaha”. Dan memang semuanya diikuti oleh ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK, Pokja-Pokja, sehingga memang dengan adanya Program CSR Rumah Srikandi ini perempuan di Badran bisa lebih maju.”

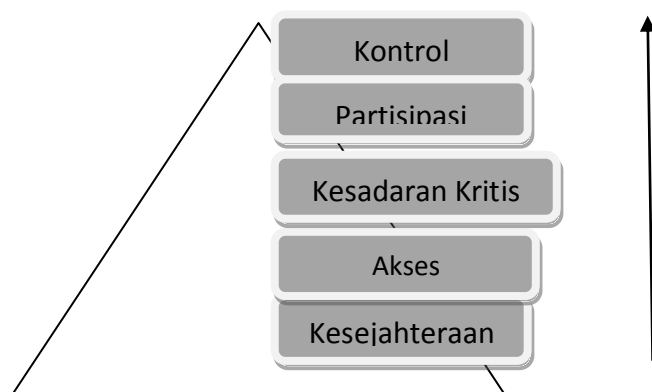
Dengan demikian PT Sari Husada dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan melalui program CSR Rumah Srikandi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat khususnya perempuan di RW XI Kampung Badran Yogyakarta.

B. Pemberdayaan Perempuan Melalui Program CSR Rumah Srikandi

Pemberdayaan perempuan menurut Suman (2007) adalah upaya memungkinkan, memandirikan masyarakat, dan menghilangkan diskriminasi. Hal ini dapat dicapai melalui dorongan, motivasi, dan penyadaran potensi yang dimiliki. Pemberdayaan perempuan sebagai kebijakan pemerintah telah tertuang dalam GBHN 2009 yang bertujuan untuk memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara aktif tanpa menghapus peran reproduktif perempuan.

Menurut Sara Longwe dalam Handayani dan Sugiarti (2005) melihat pemberdayaan perempuan melalui lima hal, yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut merupakan hubungan yang sinergis, saling melengkapi, dan memiliki hubungan yang hierarkis.

Pada pendekatan ini tingkat kesetaraan berbanding lurus dengan tingkat keberdayaan.



Sumber: Handayani dan Sugiarti (2005)

Gambar 1. Piramida Pemberdayaan Perempuan

Dimensi kesejahteraan dalam pendekatan Longwe diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan. Kesenjangan gender pada tingkat ini diukur perbedaan kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam tingkat penghasilan, kematian, atau gizi. Pemberdayaan tidak dapat terjadi di tingkat ini, melainkan harus dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap sumberdaya. Upaya untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan diperlukan keterlibatan perempuan dalam proses pemberdayaan dan pada tingkat pemerataan yang lebih tinggi.

Selain itu, dimensi akses melihat perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan. Rendahnya akses terhadap sumberdaya mengakibatkan produktivitas yang juga rendah. Perempuan di banyak komunitas diberikan tanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk meningkatkan kemampuan diri. Pembangunan tidak cukup hanya pemerataan akses, karena kurangnya akses disebabkan dari diskriminasi gender. Oleh karena itu untuk mengatasi kesenjangan gender akibat diskriminasi sistemik harus diatasi melalui penyadaran. Selanjutnya, kesadaran kritis adalah upaya untuk “melawan” subordinasi perempuan. Kesenjangan gender di tingkat ini disebabkan anggapan posisi sosial ekonomi

perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pemberdayaan di tingkat ini untuk berarti melakukan penolakan pada pandangan tersebut. Tujuannya adalah penyadaran kesetaraan gender.

Dimensi partisipasi yaitu keterlibatan perempuan secara aktif mulai dari penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring, sampai evaluasi. Meningkatnya peran serta perempuan merupakan hasil pemberdayaan. Partisipasi dibedakan menjadi partisipasi kuantitatif (jumlah laki-laki dan perempuan yang terlibat) dan kualitatif (peranan laki-laki dan perempuan dalam mengambil keputusan). Terakhir adalah dimensi kontrol, artinya perempuan harus punya kuasa untuk mengubah kondisi posisi, masa depan diri dan komunitasnya. Kesetaraan dalam kuasa menjadi prasyarat bagi terwujudnya kesetaraan gender dan keberdayaan dalam masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan hasil penelitian unsur-unsur pemberdayaan perempuan di RW XI Kampung Badran Yogyakarta melalui Program CSR Rumah Srikandi adalah sebagai berikut :

1. Kesejahteraan

Program CSR Rumah Srikandi PT Sari Husada Yogyakarta selama ini telah mampu menggugah partisipasi perempuan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini terbukti dalam kurun waktu lima tahun selama PT Sari Husada berprogram melalui kegiatan CSRnya, hampir 50% ibu-ibu di RW XI kampung Badran Yogyakarta telah memiliki usaha produktif seperti usaha kerajinan tangan, makanan, dan batik yang dikelola dengan bantuan tambahan modal usaha dari Koperasi Amal Srikandi. Selain itu adanya peningkatan kualitas hidup di bidang kesehatan melalui kegiatan *Nutrition Development Program*, di bidang pendidikan melalui kegiatan *Child Education Development*, dan *Nutrition Development Program* serta di bidang ekonomi melalui kegiatan *Economic Development Program*, berpengaruh secara signifikan terciptanya kesejahteraan keluarga.

2. Akses.

Kemampuan akses para perempuan di RW XI Kampung Badran Yogyakarta yang menjadi sasaran Program CSR Rumah Srikandi cukup baik. Banyaknya kelompok-kelompok swadaya perempuan yang ada di Kampung Badran seperti kelompok PKK, kelompok Griya Rumpun, Kelompok PUS (Perempuan Usia Subur), Kelompok Perempuan Mandiri, Kelompok Desa Prima Dahlia, Kelompok Sartika (Perempuan menjahit), Kelompok Usaha Keswadayaan Perempuan, dan Kelompok pengajian Khoirunnisa, ini memperlihatkan bahwa perempuan memiliki akses yang baik. Perempuan di Kampung Badran tidak hanya diberi beban domestik saja sehingga perempuan tidak memiliki cukup waktu untuk terlibat aktif dan meningkatkan kemampuan dirinya di luar kehidupan rumahtangganya. Meskipun demikian, memang akses yang luas masih dimiliki oleh para perempuan yang menjadi pengurus kelompok PKK, Posyandu dan Paud, belum merata kepada seluruh perempuan di RW XI kampung Badran Yogyakarta. Untuk para pengurus PKK misalnya Ibu Siti setelah Program CSR Rumah Srikandi ini, Ibu Siti sering diminta sebagai pembicara perempuan di berbagai forum kemasyarakatan, bahkan bu Siti saat ini menjadi ketua kelompok Perempuan Mandiri di Kampung Badran Yogyakarta.

3. Kesadaran Kritis

Meskipun di Kampung Badran banyak kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) perempuan yang aktif seperti kelompok PKK, kelompok Griya Rumpun, Kelompok PUS (Perempuan Usia Subur), Kelompok Perempuan Mandiri, Kelompok Desa Prima Dahlia, Kelompok Sartika (Perempuan menjahit), Kelompok Usaha Keswadayaan Perempuan, dan Kelompok pengajian Khoirunnisa, pemahaman dan kesadaran kritis atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender masih rendah. Perempuan Badran masih belum memahami kesetaraan gender sehingga secara umum perempuan di Kampung Badran masih menganggap bahwa perempuan memang harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pekerjaan domestik rumahtangga. Dengan demikian, memang untuk setiap kegiatan kelompok perempuan

dilakukan di sore hari bahkan di malam hari (sehabis isya), menunggu para suami pulang dari bekerja, sehingga meskipun perempuan aktif di kelompok perempuan, pekerjaan domestik mereka tetap tidak terbengkalai / tidak mereka tinggalkan.

4. Partisipasi

Untuk partisipasi perempuan dalam kegiatan Program CSR Rumah Srikandi cukup baik. Dalam hal ini perempuan dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program CSR. Dalam pelaksanaan program CSR partisipasi perempuan di Kampung Badran sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran perempuan dalam setiap kegiatan program CSR Rumah Srikandi. Namun demikian, partisipasi mereka masih terbatas pada lingkup perempuan sendiri yakni dalam bentuk kesertaan mereka dalam kegiatan PKK dan kegiatan kelompok perempuan lainnya yang notabene seluruh anggotanya adalah perempuan. Sementara untuk partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis di dalam rumah tangganya masih didominasi oleh suami mereka.

5. Kontrol (Kesetaraan dalam kekuasaan.)

Dalam hal kesetaraan dalam kekuasaan, para perempuan di RW XI kampung Badran Yogyakarta belum memiliki bargaining power yang kuat dalam kekuasaan atas faktor produksi dan distribusi sumberdaya mereka. Perempuan di Kampung Badran belum memiliki kuasa untuk mengubah kondisi posisi, masa depan diri dan komunitasnya. Kekuasaan dalam mengubah kondisi masyarakat Badran masih didominasi oleh laki-laki.

C. Model Pemberdayaan Perempuan Yang Perlu Dilakukan Di Kampung Badran Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya pemberdayaan perempuan oleh PT Sari Husada Yogyakarta memang sudah dilakukan dan sudah dapat dirasakan manfaatnya. Akan tetapi masih perlu ditingkatkan dengan model pemberdayaan perempuan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Pemberdayaan kesadaran kritis perempuan.

Dalam hal ini diperlukan dukungan seluruh stakeholders terkait, (baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM) dalam ikut serta meningkatkan kesadaran kritis dan kontrol tentang hak dan kewajibannya mereka sebagai warga negara dan peran perempuan dalam pembangunan misalnya melalui kegiatan advokasi dan penyuluhan kepada perempuan, sehingga perempuan menyadari akan peran dan tanggungjawabnya terhadap proses pembangunan. Umumnya perilaku perempuan sangat dipengaruhi oleh sosio kultural Jawa, dimana Perempuan masih sering hanya dianggap sebagai “konco wingking” yang hanya berperan di bidang domestik, seputar dapur, sumur dan kasur saja.

- Pemberdayaan kapasitas perempuan.

Dalam hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya perempuan di Kampung Badran melalui kegiatan pelatihan ketrampilan kerja perempuan sehingga perempuan memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarganya dan pada akhirnya juga perempuan memiliki bargaining power dalam menentukan nasib dan masa depannya termasuk komunitasnya.

- Pemberdayaan kewirausahaan melalui pendekatan kelompok perempuan
Memberi dukungan secara penuh baik moril maupun material (bantuan modal usaha) terhadap perempuan di kampung Badran yang sudah memiliki usaha produktif. Dengan model pemberdayaan kewirausahaan melalui pendekatan kelompok perempuan, diharapkan para perempuan di Kampung Badran ini mampu menjadi wirausahawan yang ulet dan handal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan PT Sari Husada Yogyakarta melalui Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Rumah Srikandi dengan 3 pilar programnya yaitu *Economic Development Program, Child Education Development, dan Nutrition Development Program* sudah dilakukan.
- Dalam memberdayakan perempuan terdapat lima dimensi yang sangat berpengaruh yaitu kesejahteraan, akses sumber daya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol perempuan.
- Pemberdayaan perempuan melalui program CSR Rumah Srikandi di Kampung Badran Yogyakarta, masih perlu peningkatan khususnya dalam dimensi kesadaran kritis dan kontrol.
- Model pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui (1). Pemberdayaan kesadaran kritis perempuan. (2).Pemberdayaan kapasitas perempuan dan (3). Pemberdayaan kewirausahaan melalui pendekatan kelompok perempuan.

B. Saran

- Model yang telah dirumuskan perlu diujicobakan dan diteliti kembali sehingga betul-betul sesuai dengan kebutuhan perempuan di wilayah kampung Badran.
- Adanya keterbatasan dalam penelitian ini yakni belum teridentifikasinya analisis faktor karakteristik perempuan yang menjadi sasaran program CSR, sehingga peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya mampu mengatasi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Moh. Ali dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, Paradigma Aksi dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Bungin, B. 2006. *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Carroll, A. 1997. *A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance*. *Academy of Management Review* Vol. 4 pp. 490–505.
- Cresswell, J.W. 2009. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif and Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Curtis, dan B., Floyd, James J., Winsor, Jerry L., 2005, *Komunikasi Bisnis dan Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hadi, Noor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hart, S.L. 2005. *Innovation, Creative Destruction and Sustainability*. Cornell University: Industrial Research Institute.
- Heimann, G.. 2008. *Corporate Social Responsibility Global Standards & Policies in Practice*, The Liberian International Ship & Corporate Registry USA.
- Hubeis, A.V.S., 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Lexy J. Moleong (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya.
- Mardikanto, Totok. 2010 a *Komunikasi Pembangunan*. Program Pascasarjana Program Studi Pemberdayaan Masyarakat. Surakarta: UNS Press.
- 2010b. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Cetakan I Surakarta: FP and UNS Press.
- 2014, *Penyuluhan Pembangunan*, Surakarta : UNS Press
- Mulyana, Deddy, 2005, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasaruddin Umar. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender (Perspektif AlQuran)*. Jakarta: Dian Rakyat
- Nazir, Moh 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia, Indonesia
- Prayogo, Dody. (2011). *Socially Responsible Corporation*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)
- Rakhmat, Jalaluddin, 1994, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Schutz, W. D., 1966, *The Interpersonal Underworld*, Palo Alto: Science and Behavior Books.

Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono.2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit CV Alfabeta

Sutopo, HB. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Suryono. 2001. *Teori and Isue Pembangunan*, Malang: UM-Press.

Sumodiningratan, Gunawan (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Todaro, M.PP. 1977. *Economic Development in the Third World*, London: Longmans.

Wiryanto, 2005, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Sari Husada, *Deskripsi Rumah Srikandi*, 2012, Corporate Affairs.

Sari Husada, *Menyelamatkan Generasi (22 tahun Sari Husada Mengabdikan untuk Masa Depan Bangsa)*. Jakarta, 2009, Media Indonesia.